

## Mabes Polri Minta Tambah Anggaran Rp60,64 T untuk Bangun Polres-Polsek

JAKARTA (IM) - Wakapolri Komjen Agus Andrianto menyampaikan usulan penambahan anggaran Polri di Tahun Anggaran 2025 sebanyak Rp 60,64 triliun. Dengan usulan tersebut, anggaran Polri mencapai Rp 165 triliun jika penambahan disetujui.

Hal itu disampaikan Agus dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6). Agus menyampaikan pagu indikatif Polri yang telah disetujui sebesar Rp 104 triliun.

"Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp 104.670.300.810.000. Untuk itu sesuai Surat Kapolri Nomor B/7641/VII/REN.2.3/2024 tanggal 4 Juni 2024 hal usulan anggaran tambahan Polri dalam rangka penetapan Pagu Anggaran Polri Tahun Anggaran 2025, Polri mengusulkan tambahan anggaran," ujar Agus dalam rapat.

Sementara, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 60.643.680.827.000. Dia merincikan, belanja pegawai sebesar Rp 4,98 triliun, belanja barang sebesar Rp11,68 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 43,97 triliun.

Agus menyampaikan sejumlah prioritas peruntukan belanja modal. Di antaranya untuk pembangunan mako polres dan polsek.

"Belanja modal sebesar Rp 43,97 T yang diprioritaskan untuk, pemenuhan alamsus, penambahan SPKT di tingkat Polres, peningkatan layanan ruang pelayanan kepolisian (RPK)," papar Agus.

"pembangunan mako polres subsektor perbatasan, pembangunan mako polsek, pembangunan satpas dan BPKB, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, pembangunan fasilitas dan konstruksi Polri lainnya," katanya. • lus

## Polda Jabar Kembali Periksa 3 Saksi Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon

BANDUNG (IM) - Tiga saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky kembali diperiksa penyidik Polda Jawa Barat (Jabar).

Ketiganya merupakan rekan dari 5 orang terpidana yang divonis penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi pada 2016 lalu.

Berdasarkan pantauan di Mapolda Metro Jaya, saksi Okta, Pramudya dan Teguh, tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, pukul 10:00 WIB, Selasa (11/6). Ketiganya datang dengan didampingi belasan pengacara.

Saksi Okta, Pramudya

dan Teguh disebut akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan dan penidrik Vina dan Eky pada 8 tahun silam.

Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan pada 2016 lalu berada di bawah tekanan sehingga berujung pada 5 orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup.

Para saksi sengaja didampingi penasihat hukum yang sekaligus akan mengumpulkan bukti baru demi upaya peninjauan kembali kasus yang menjerat 5 orang terpidana kasus kematian Vina dan Eky. • lus

FOTO: ANT



## RAKER POLRI DENGAN KOMISI III DPR

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) didampingi Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada (kedua kiri), Irwasud Komjen Pol Ahmad Dofiri (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6). Raker tersebut membahas rencana kerja anggaran Polri tahun 2025 dan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022.

# Moeldoko Minta Publik Tak Berlebihan Merespon Draft Awal Rancangan UU Polri

Masyarakat bisa mengkritik dan mengawasi proses pembahasan revisi UU Polri. "Pemerintah siap menerima kritik dari masyarakat," ujar Moeldoko.

JAKARTA (IM) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta publik tak berlebihan merespon draft awal Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Pasalnya, dalam draft yang beredar, Polri bakal memiliki tambahan wewenang untuk melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.

"Kita jangan terlalu berlebihan, semua dari kita punya hak dan kewajiban untuk negara ini," ujar Moeldoko di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Menurutnya, masyarakat bisa memberikan kritik dan mengawasi proses pembahasan revisi UU Polri itu. Sebagai negara demokrasi, pemerintah siap menerima kritik dari masyarakat.

"Kan masyarakat yang bisa mengontrol semuanya. Kita negara demokrasi, semua hak, semua dari kita punya hak dan kesempatan untuk mengontrol," katanya. Sementara itu, DPR disebut tinggal menunggu persetujuan pemerintah yang ditandai dengan pengiriman surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) agar pembahasan RUU Polri bisa dilanjutkan.

Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, meminta DPR memprioritaskan banyak RUU lain ketimbang RUU Polri. Sebab sisa masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024 tinggal 4 bulan, terlalu singkat untuk membahas rancangan baileid yang tak pernah dibuka ke publik itu.

Fajri berharap Presiden Joko Widodo menunda mengeluarkan surpres. Tapi, ia tak yakin Jokowi bakal mengambil langkah tersebut. "Saya meyakini bahwa munculnya RUU TNI dan RUU Polri untuk dibahas saat ini sudah ada restu dari Presiden," katanya.

"Jadi kalau kalian, dikau

merasa ini enggak sreg kan bisa. Tapi kan pembahasannya belum dimulai," ujar Pacul. Namun demikian, Pacul meminta publik untuk tidak buru-buru memandang negatif proses revisi UU Polri yang dipersoalkan sejumlah pihak dalam beberapa waktu terakhir. Ia kembali menegaskan bahwa proses pembahasan revisi UU Polri akan dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh masyarakat luas.

"Kalau hari ini siapa pun akan selalu melihat dari sisi negatif kacamatanya. Tapi kan belum dibuka. Nanti kalau dibuka itu akan kita baca bareng-bareng. Kita yang pegang nomor punggung, nendang bola, kita pemain," kata Pacul.

"Tetapi di sana kan kalian nonton semua, enggak ada pembahasan tertutup. Jadi jangan terlalu bercuriga lah, ya?" katanya. • lus

Surat Presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) agar pembahasan RUU Polri bisa dilanjutkan.

Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, meminta DPR memprioritaskan banyak RUU lain ketimbang RUU Polri. Sebab sisa masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024 tinggal 4 bulan, terlalu singkat untuk membahas rancangan baileid yang tak pernah dibuka ke publik itu.

Fajri berharap Presiden Joko Widodo menunda mengeluarkan surpres. Tapi, ia tak yakin Jokowi bakal mengambil langkah tersebut. "Saya meyakini bahwa munculnya RUU TNI dan RUU Polri untuk dibahas saat ini sudah ada restu dari Presiden," katanya.

"Jadi kalau kalian, dikau

merasa ini enggak sreg kan bisa. Tapi kan pembahasannya belum dimulai," ujar Pacul. Namun demikian, Pacul meminta publik untuk tidak buru-buru memandang negatif proses revisi UU Polri yang dipersoalkan sejumlah pihak dalam beberapa waktu terakhir. Ia kembali menegaskan bahwa proses pembahasan revisi UU Polri akan dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh masyarakat luas.

"Kalau hari ini siapa pun akan selalu melihat dari sisi negatif kacamatanya. Tapi kan belum dibuka. Nanti kalau dibuka itu akan kita baca bareng-bareng. Kita yang pegang nomor punggung, nendang bola, kita pemain," kata Pacul.

"Tetapi di sana kan kalian nonton semua, enggak ada pembahasan tertutup. Jadi jangan terlalu bercuriga lah, ya?" katanya. • lus

Surat Presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) agar pembahasan RUU Polri bisa dilanjutkan.

Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, meminta DPR memprioritaskan banyak RUU lain ketimbang RUU Polri. Sebab sisa masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024 tinggal 4 bulan, terlalu singkat untuk membahas rancangan baileid yang tak pernah dibuka ke publik itu.

Fajri berharap Presiden Joko Widodo menunda mengeluarkan surpres. Tapi, ia tak yakin Jokowi bakal mengambil langkah tersebut. "Saya meyakini bahwa munculnya RUU TNI dan RUU Polri untuk dibahas saat ini sudah ada restu dari Presiden," katanya.

## Dibahas Terbuka

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryantosebelumnya mengklaim bahwa proses pembahasan revisi Undang-undang Polri atau RUU Polri akan dilakukan secara terbuka. Bambang Pacul, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa publik dapat mengetahui ketentuan-ketentuan mana dalam revisi UU Polri yang dianggap membahayakan.

Semuanya dibahas terbuka kok. Nanti kalau membahayakan kelihatan. Kalian juga bisa ikut melihat pembahasannya tidak ada yang tertutup," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6) lalu.

Politikus PDI-P itu juga mempersilakan publik untuk mengkritik revisi UU Polri jika memang ada muatan materi yang dirasa janggal atau berlebihan.

"Jadi kalau kalian, dikau

## Kompolnas Minta Polwan yang Tega Bakar Suami Diperiksa Kejiwaannya

JAKARTA (IM) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polda Jawa Timur (Jatim) memeriksa kejiwaan Polwan Briptu FN (28) yang tega membakar suaminya, Briptu RDW (29) di Mojokerto.

"Kami meminta Polda Jatim untuk memeriksa apakah ada kemungkinan tersangka mengalami Post Partum Depression yang berdampak pada tindakan keji di luar nalar, sehingga bukan hanya terkait kemarahan akibat korban (suami) bermain judi online," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, saat dihubungi, Selasa (11/6).

Poengky mengatakan, Kompolnas mendapat kabar bahwa Briptu FN baru masuk kerja setelah mengambil cuti melahirkan anak yang kembar. Kompolnas juga mendorong adanya pendampingan psikiater kepada Briptu FN serta pendampingan psikolog kepada anak-anak mereka.

"Sehingga patut diduga ada sebab-sebab lain yang membuat emosi tersangka memuncak," kata Poengky. Selain itu, Poengky juga

meminta Polda Jatim melakukan penyidikan dengan dukungan *scientific crime investigation*. Saat ini Polda Jatim masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, termasuk psikiater juga dilibatkan untuk memeriksa kejiwaan tersangka.

**Sakit Hati**  
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto sebelumnya mengatakan, FN sakit hati karena RDW kecanduan judi online. Korban main judi online dengan memakai uang belanja istri.

"Kasus tersebut berawal saat FN mengetahui uang di rekening bank milik suami yang berisi gaji ke-13 senilai Rp2.800.000 berkurang menjadi Rp800.000. Setelah itu FN menelpon suaminya untuk menanyakan soal rekening yang berkurang dan ia pun meminta RDW untuk pulang ke rumah.

Sebelum suaminya sampai di rumah, FN lebih dulu membeli bensin yang diisi dalam botol. Bensin itu ditaruhnya di atas lemari teras. Lalu ia mengirimkan foto melalui

Whatsapp dan kembali meminta RDW segera pulang.

FN juga mengancam akan membakar ketiga anaknya jika RDW tak segera pulang. FN kemudian menyuruh asisten rumah tangga (ART) untuk membawa anak-anak korban untuk bermain di luar.

Tak lama kemudian, RDW pulang ke rumah dan langsung diborgol oleh istrinya sendiri. Mereka berdua pun terbit cekok di dalam rumah dengan kondisi pintu terkunci. Dalam posisi duduk, korban langsung disiram bensin oleh FN. Setelah itu, FN menyalakan korek dan membakar tisu yang di pegang menggunakan tangan kanan sambil berkata,

"Ini lho, Yang, lihaten iki (lihatlah ini)."

Api menyambar tangan FN dan langsung menyambar ke tubuh korban yang sudah berlumur bensin. Korban sontak terbakar dan berteriak minta tolong.

Peristiwa Briptu FN membakar suaminya, Briptu RDW, terjadi di Asrama Polisi (Aspol) Polres Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (8/6). • lus

FOTO: ANT



## PENANGKAPAN PEMBURU BADAK JAWA

Kapolda Banten Irijen Pol Abdul Karim (kanan) bersama Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani (kiri) dan Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto (tengah) memperlihatkan barang bukti peluru ukuran besar saat rilis penangkapan pemburu Badak Jawa di Serang, Banten, Selasa (11/6). Jajaran Polda Banten bekerja sama dengan KLHK menggelar razia senjata api di kawasan TNUK dan berhasil menangkap enam orang kawanan pemburu Badak Jawa serta menyita sejumlah senjata api laras panjang.

FOTO:IM/FRANS



## KABID HUMAS POLDA METRO JAYA BERIKAN PENGHARGAAN

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyerahkan penghargaan ke salah satu pemenang lomba Viralisasi Konten Non Official Jajaran Polda Metro Jaya, di Aula Bidhumas Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/6). Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan kepada personal yang telah berdedikasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugas Kepolisian, khususnya dalam bidang Humas.

## Pasutri Penipu Petani Subang Janjikan Anak Masuk Polisi Ditahan

JAKARTA (IM) - Pasangan suami istri (pasutri) ditetapkan sebagai tersangka penipuan petani dengan modus anaknya dijanjikan menjadi Polisi Wanita (Polwan). Kedua tersangka ditahan.

"Terhadap kedua tersangka, kita lakukan penahanan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat (Jakbar) Kombes M Syahduddi, kepada wartawan, Selasa (11/6).

Pasutri yang ditetapkan sebagai tersangka ialah pecatan polisi bernama Asep Sudirman (AS) dan Aiptu Heni Puspitaningsih (HP). Keduanya ditahan di rutan Polres Metro Jakbar.

Pasutri tersebut awalnya dipanggil untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan dan tercurupi alat bukti, keduanya langsung ditetapkan sebagai ter-

sangka. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan kedua tersangka masih diperiksa. Penyidik masih mendalami kasus dugaan penipuan terhadap petani bermotus menjanjikan Polwan.

"Masih dilakukan pendalaman terhadap kedua tersangka," kata AKBP Andri Kurniawan.

Diberitakan sebelumnya, petani bernama Carlim Sumarlin (56) asal Desa Wanakarta, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tertipu oknum polisi agar anaknya bisa lolos pendaftaran Polwan.

Carlim bahkan telah membayar uang pelicin senilai Rp 598 juta agar putrinya Teti Rohaeti bisa menjadi seorang Polwan. • lus

## Pelaku Usaha Minyak Goreng Ilegal di Malang Untung Rp400 Juta Sebulan

MALANG (IM) - Dua pengusaha minyak goreng ilegal di Kabupaten Malang rata-rata per bulan meraup keuntungan hingga Rp400 juta.

Keduanya pengusaha minyak goreng ilegal itu telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Muhammad Zainuddin (36), warga Jalan Suropati Nomor 19 RT 1 RW 17, Desa Wajak, dan Mulyono (47) warga Jalan Janti, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, merupakan pemilik rumah yang digunakan untuk produksi minyak goreng curah ilegal. Mulyono disebut sebagai otak dari praktek curah itu.

Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih menyebutkan, pelaku Muhammad Zainuddin sebenarnya memulai usaha berjualan minyak goreng pada Maret 2023. Saat itu pelaku memanfaatkan rumahnya untuk berjualan minyak goreng, tetapi belum sampai ke tahap memproduksi minyak goreng ilegal.

"Kemudian di bulan Februari 2024 ini MZ (Muhammad Zainuddin) bertemu dengan tersangka M, dari tersangka M menyampaikan niat bekerjasama mengemas dan mengedarkan mengabaikan kemasan polos," ujar Imam Mustolih, di Mapolres Malang, Selasa (11/6).

Sejak itu, keduanya bekerjasama memproduksi minyak goreng ilegal, dari minyak curah yang dikemas ulang dan diberikan label Minyak Kita. Di mana tersangka Muhammad Zainuddin, bertanggung jawab untuk bahan baku minyak goreng kemasan botolnya, sekaligus mempekerjakan karyawan mengemas minyak goreng curah dikemas dengan minyak goreng label Minyak Kita.

"Tersangka M menyediakan stiker label Minyak Kita, produksi dari CV Sinar Subur Barokah Malang," ujarnya.

Keduanya mendapatkan keuntungan berbeda-beda setiap minggunya, selama kurang lebih empat bulan beroperasi. Keuntungan itu didapat dari penjualan setiap pekannya. Dimana satu bulannya rumah

produksi di Jalan Suropati Nomor 19 RT 1 RW 17 Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, mampu mengirim tiga sampai empat kali ke sejumlah distributor minyak goreng, dengan sehari menyuplai sebanyak 1.000 botol atau satu ton.

"Tersangka Muhammad Zainuddin meraup keuntungan rata-rata berkisar antara Rp36 sampai 50 juta, sedangkan untuk tersangka Mulyono mendapatkan keuntungan Rp25 - 35 juta per pekannya," tuturnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat mengatakan, keuntungan Rp200 juta hingga Rp400 juta itu merupakan keuntungan bersih yang diperoleh tersangka Muhammad Zainuddin dan Mulyono, dari penjualan minyak goreng ilegal yang diberi label Minyak Kita.

"Keuntungan bersih ini dalam satu bulan para tersangka ini mendapatkan keuntungan sejumlah satu bulan ini Rp200 juta, sampai dengan hampir Rp400 juta satu bulannya," ucap Gandha Syah.

Sebelumnya diberitakan, Satgas Pangan Polres Malang berhasil membongkar penjualan minyak goreng ilegal berlabel Minyak Kita. Minyak goreng ini diedarkan di pasar-pasar dan ditemukan saat Tim Satgas Pangan melaksanakan pemantauan bahan-bahan pokok. Saat itu tim mendapatkan keluhan dari pedagang dan pembeli akan kemasan dan isi minyak goreng Minyak Kita, produksi CV Sinar Subur Barokah, tidak sesuai berat kemasan yang tertera.

Dari sanalah tim melaksanakan penyelidikan dan menemukan fakta adanya rumah produksi minyak goreng di Jalan Suropati Nomor 19 RT 1 RW 17 Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan berhasil menangkap tangan satu unit truk yang berisikan ribuan botol minyak goreng berlabel Minyak Kita siap edar, dan botol minyak goreng polos tanpa label, pada Jumat 31 Mei 2024, pukul 16.00 WIB. • lus